



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB**

Jl. Raya Tangkil - Mindaka, Tarub Tegal, Jawa Tengah 52184
<http://tarub.tegalkab.go.id> email:kec-tarub@tegalkab.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Renja) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59



Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarub Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2023, rancangan prioritas dan sasaran serta program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harap kan dari pihak semua guna mewujudkan cita – cita serta visi dan misi Kabupaten Tegal.

Tarub, Desember 2021
CAMAT TARUB

Drs. AGUNG BUDI WALUYO, MM
Pembina TK I
NIP. 19710205 199201 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Tarub Tahun 2021	6
2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tarub	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
Bab III Tujuan dan Sasaran	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	27
3.3. Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan	28
3.4. Program dan Kegiatan	28
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan	31
Bab V Penutup	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Bulan November 2021 Kecamatan Tarub.....	7
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	16
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	20
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	26
Tabel 3.1	: Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	28
Tabel 4.1	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	32
Tabel 4.2	: Rencana Kerja/ Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tarub Tahun 2023.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Ranwal Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sejalan dengan penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis tepat anggaran, tepat sasaran karena dalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (*framework*) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tarub Tahun 2023 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran, indikator kinerja, hasil dan keluaran yang terukur, kelompok sasaran dan rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan guna mendukung kebijakan Bupati terpilih tahun 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tarub dan diimplementasikan ke dalam Renja.



Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Camat Tarub Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2009-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 adalah :



1. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2019 2024 dan pedoman kerja Kecamatan Tarub Tahun 2023.
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
3. Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting tentang tugas dan fungsi SKPD, serta review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TARUB

Terdiri dari rencana kegiatan dan Program serta target untuk Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tarub, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2021 Kecamatan Tarub melaksanakan lima (5) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tarub Tahun 2021.

Dari lima (5) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan November 2021 sebesar 73.55%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Bulan November 2021
Kecamatan Tarub

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan			Realisasi Renja 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		Target Capaian	Pagu Penetapan 2021	Pagu Perubahan Anggaran 2021	Realisasi Renja 2021	Realisasi Keuangan	Realisasi Renja 2021	Realisasi Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.456.524.000	1.723.846.500		80,53	77,51	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.638.000	14.348.000		54,47	10,30	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja SKPD	5 buku	4.187.000	2.563.000	75,00	7,32	100,00	
	Penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profile Kec.	1 dokumen	24.451.000	11.785.000	2 Dokumen	10,95	2 Dokumen	
	Pameran investasi/Perc. Pembangunan	1 kegiatan						
	Penyusunan LKjIP	5 buku						
	Penyusunan Dokumen SPIP	5 buku						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.269.411.000	1.356.007.000		89,52	89,52	



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.249.711.000	1.336.307.000	13 Bulan	89,49	14,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan SKPD	12 bulan	19.700.000	19.700.000	11 Bulan	91,29	12,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.740.000	69.740.000		72,54	39,41	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2.635.000	2.635.000	2 jenis	93,47	2 jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	15 jenis	9.900.000	9.900.000	15 jenis	80,23	15 jenis	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan kantor	15 jenis	2.790.000	2.790.000	15 jenis	96,11	15 jenis	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	6.685.000	6.685.000	11 bulan	82,38	11 bulan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	16000 lbr	3.605.000	3.605.000	16000 lbr	86,18	16000 lbr	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan/koran	12 bulan	2.640.000	2.640.000	11 Bulan	72,92	12 bulan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah	210 kali	16.485.000	41.485.000	11 Bulan	9,30	210 kali	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.245.000	77.800.000		91,08	63,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	350 lembar	1.495.000	500.000	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 bulan	30.000.000	33.000.000	11 Bulan	38,42	12 bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium petugas kebersihan dan Petugas Jaga malam	12 bulan	31.750.000	44.300.000	11 Bulan	82,02	12 bulan	



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	150.000.000	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Video Conference	I Set		150.000.000	-	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.490.000	55.951.500		80,40	79,06	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit mobil dan 10 unit motor	40.100.000	40.100.000	1 unit mobil dan 10 unit motor	86,27	1 unit mobil dan 10 unit motor	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Gedung	10.390.000	10.390.000	1 Gedung	92,80	1 Gedung	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laptop; 1 Komputer; 2 Printer		5.461.500	-	-	2 Laptop; 1 Komputer; 2 Printer	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		41.185.000	41.185.000		58,89	27,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.031.000	20.031.000		38,34		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rakor Bidang Pemerintahan (Rakor Penderasan PBB dan Rakor Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, rakor LKPJDes)	3 rakor	20.031.000	20.031.000	Rakor PBB, Kinerja Perangkat dan Penderasan PBB	38,34	Rakor PBB, Kinerja Perangkat dan Penderasan PBB	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			15.897.000	15.897.000		-		



Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rakor bidang Yanum (Pendataan sarana prasarana infrastruktur, Sanitasi dan Persampahan	3 rakor	15.897.000	15.897.000		-	Rakor bidang Yanum (Pendataan sarana prasarana infrastruktur, Sanitasi dan Persampahan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.257.000	5.257.000		65,46		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan (Penertiban Perijinan)	1 kegiatan	5.257.000	5.257.000	Pelayanan dan Monitoring Perizinan	65,46	Pelayanan dan Monitoring Perizinan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			166.227.000	87.079.500		40,49	34,22	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			166.227.000	87.079.500		40,49	34,22	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	17.985.000	17.985.000	100,00	87,89	100,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tilik Desa	1 kegiatan	148.242.000	69.094.500	Pembinaan PKK	20,24	Pembinaan PKK	
	Hari Jadi Kabupaten Tegal	1 Kegiatan			Rakor Mitigasi Bencana		Rakor Mitigasi Bencana	
	Pelatihan/Lomba Gamelan	1 Kegiatan			Rakor Bidang Pemberdayaan Desa			



	Penyelenggaraan MTQ	1 kegiatan						
	Penyelenggaraan FASI	1 kegiatan						
	Pembinaan PKK	20 Desa						
	Pembinaan Kepemudaan	1 kegiatan						
	Rakor Bidang Kesra	6 Rakor						
	Rakor Bidang Pemberdayaan Desa	3 Rakor						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		53.265.000	53.265.000		96,65	60,91	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		53.265.000	53.265.000		96,65	60,91	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan HUT RI	1 kegiatan	31.833.000	31.833.000	Pelaksanaan HUT RI	41,45	Pelaksanaan HUT RI	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Forkopimcam	12 bulan	21.432.000	21.432.000	Pelaksanaan Forkopimcam	89,82	21.432.000,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		30.193.000	30.193.000		47,17	90,26	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		30.193.000	30.193.000		47,17	90,26	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Lomba Desa (Monev Adm Desa)	20 desa	5.883.000	5.883.000		-	Pelaksanaan Lomba Desa (Monev Adm Desa)	



Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan Lembaga Desa BPD	20 Desa	7.751.000	7.751.000	Pembinaan Lembaga Desa BPD	84,91	Pembinaan Lembaga Desa BPD	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Linmas	1 kegiatan	16.559.000	16.559.000	Pembinaan Linmas	46,27	Pembinaan Linmas	
	Rakor Keamanan Lingkungan	Kegiatan			Rakor Keamanan Lingkungan		Rakor Keamanan Lingkungan	
			1.747.394.000	1.935.569.000		73,55		

Sumber : Kecamatan Tarub 2021



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tarub sampai dengan Bulan November 2021 dapat dijelaskan bahwa terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, karena faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Refocussing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid 19;
 - b. Efisiensi anggaran berupa sisa dari beberapa rekening belanja.
 - c. Penerapan kebijakan PPKM di Kabupaten Tegal.
2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
 - b. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
 - c. Intensifikasi
 - d. Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
 - e. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tarub

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Tarub Nomor 01.001/130/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan.

Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yaitu meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas dibawah 100 M2
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
3. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Umum tingkat Kecamatan

Selain pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kecamatan Tarub, ada beberapa pelayanan dimana fungsi Kecamatan hanyalah memberikan



rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas/Instansi yang mengelola langsung pelayanan dimaksud.

Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Pelayanan KTP/KK

Proses pelayanan KTP/KK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal melalui petugas PATEN yang ditempatkan di Kecamatan Tarub. Oleh karena itu baik standar operasional prosedur dan kelancaran proses pelayanan KTP/KK di Kecamatan Tarub tergantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

2. Surat Pengantar SKCK

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Tarub hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Tarub.

3. Surat Pengantar Ijin Gangguan/Non Gangguan (HO/Non HO).

Pelayanan pengurusan pembuatan surat ijin gangguan / non gangguan (HO/Non HO) pada tingkat Kecamatan, hanya memberikan persetujuan pembuatan ijin gangguan / non gangguan guna diteruskan kepada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tegal.

4. Surat Pengantar Ijin Keramaian

Penerbitan Surat Ijin Keramaian merupakan wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Tarub dan diketahui oleh pihak Kecamatan.

5. Surat Keterangan Pindah

Pengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam proses pembuatannya memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

6. Pelayanan Surat-surat Lainnya

Dalam hal pengurusan surat – surat lainnya yang meliputi diantara lain surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan,



surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan/pengantar lainnya.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Tarub disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.2 (Tabel C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Renja		Catatan Analisa
			Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 November (n-1)	Tahun 2022	Tahun 2023 (thn n+1 Disamakan Target Renstra)	
Indikator dan Target Renstra 2019-2024											
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik		80,55	81,8	83,05	84,05	80,55	79,08	83,05	84,05	
2	Desa Berkembang		16	16	15	15	16	16	15	15	
	Desa Maju		4	4	4	4	4	4	4	4	
	Desa Mandiri		0	0	1	1	0	0	1	1	
Indikator dan Target Perubahan Renstra 2022-2024											
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik		80,55	81,8	83,05	84,05	80,55	79,08	83,05	84,05	
2	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi		50	50	68	89	50	50	68	89	
3	Desa Berkembang		16	16	16	15	16	16	16	15	
	Desa Maju		4	4	4	4	4	4	4	4	
	Desa Mandiri		0	0	0	1	0	0	0	1	
4	Prosentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		100	100	100	100	100	100	100	100	



Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Talang Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Tarub yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut
 - Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan reealisasi kegiatan
 - Belum tersedianya ruang pelayanan yang representative di Kantor Kecamatan Tarub, karena Gedung Kantor Kecamatan Tarub terbakar pada tahun 2019.
 - Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait
 - Merupakan IKU baru hasil Perubahan Renstra 2019-2024.
2. IKU Kecamatan Tarub yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IDM (Indeks Desa Membangun)
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
 - Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Tarub Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2023 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan;
- Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes yang lebih intensif.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Isu-isu penting pada Kantor Camat Tarub antara lain adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Tarub, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2. Masih rendahnya prosentase desa mandiri

Belum Terwujudnya Desa Mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya

Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, harus ada tindakan konkrit sebagai berikut :

1. Perlu penambahan personil yang capable di bidang komputerisasi sehingga program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar.
2. Perlu segera dibangun gedung baru kecamatan Tarub pasca terjadinya kebakaran dan penambahan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sehingga seluruh



program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

3. Dengan adanya anggaran kegiatan yang cukup akan dapat mendukung program dan kegiatan Bupati terpilih tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat lihat pada Tabel T-C.31



Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023		Hasil Analisa Kebutuhan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub		2.157.891.100		2.157.891.100	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu		35.000.000		35.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, jumlah dok renja RB, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok Laporan kinerja LKJIP, Lap Keu, LAKIP	1 Tahun	29.000.000	1 Tahun	29.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.367.671.000		1.367.671.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.342.671.000	1 Tahun	1.342.671.000	Kecamatan Tarub



7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan		15.000.000		15.000.000	
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan		15.000.000		15.000.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.000.000		69.000.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kebutuhan alat listrik dan elektronik	6 Jenis	5.000.000	6 Jenis	5.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpebutuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	15.000.000	20 Jenis	15.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpebutuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga	16 Jenis	5.000.000	16 Jenis	5.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah amplop dinas, stopmap dinas banner tercetak dan dokumen yang tergandakan	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya perjalanan dalam rangka kedinasan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan		371.430.100		371.430.100	



7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Meja/Kursi Pegawai dan Mebeulair Ruang Pelayanan Kecamatan Tarub		169.059.000	0	169.059.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia				-	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		152.371.100	0	152.371.100	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainya tercukupi		50.000.000	0	50.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan		118.790.000		118.790.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya layanan listrik, telepon dan Internet	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	51.290.000	12 Bulan	51.290.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD		181.000.000		181.000.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif surat pajak kendaraan; jumlah liter BBM	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan memsin yang terpelihara	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya bangunan kerja gedung kantor	1 Gedung		1 Gedung		Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya terpelihara	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000	Kecamatan Tarub



7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	83,05%	52.600.000		52.600.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan		33.100.000		33.100.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Tilik Desa)	12 Bulan	33.100.000	12 Bulan	33.100.000	Kecamatan Tarub
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan		19.500.000		19.500.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rakor PBB (penderasan) paten, IMB	12 Bulan	19.500.000	12 Bulan	19.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	20% 0%	135.000.000		135.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa		135.000.000		135.000.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor, jumlah pelatihan (rakor pasar, pelatihan manajemen BUMDes)		10.000.000		10.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasi, Festival Budaya, Karang Taruna, MTQ, Rakor Kemiskinan	4 Kegiatan	100.000.000	4 Kegiatan	100.000.000	Kecamatan Tarub



7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			21.236.500		21.236.500	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum			11.236.500		11.236.500	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	3 Kegiatan	11.236.500	3 Kegiatan	11.236.500	Kecamatan Tarub	
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan			10.000.000		10.000.000	
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda	3 Kegiatan	10.000.000	3 Kegiatan	10.000.000	Kecamatan Tarub	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan			115.000.000		115.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				115.000.000		115.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	hari jadi Kab tegal dan HUT RI	2 Kegiatan	65.000.000	2 Kegiatan	65.000.000	Kecamatan Tarub	



					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	FKDM	1 Forum	25.000.000	1 Forum	25.000.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Kominikasi Pimpinan Kecamatan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi		59.050.000		59.050.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan		59.050.000		59.050.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Desa	16.200.000	20 Desa	16.200.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	20 Desa	12.500.000	20 Desa	12.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	20 Desa	21.350.000	20 Desa	21.350.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	20 Desa				Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	20 Desa				Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa	9.000.000	20 Desa	9.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa				Kecamatan Tarub
								2.540.777.600		2.540.777.600	



Mencermati materi rancangan awal RKPD maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 mendasari pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang telah dilakukan penyelarasan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
- b. Penyusunan usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dibatasi melalui Pagu Indikatif SKPD;
- c. SKPD menyusun program kegiatannya berdasarkan prioritas dan sangat memungkinkan terjadi pengurangan anggaran pada prioritas anggaran yang lain.
- d. Diperlukan tambahan anggaran di luar pagu indikatif SKPD guna memenuhi kebutuhan SKPD agar kinerja pelayanan SKPD dapat berjalan lebih optimal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 dan Form I.A

**Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN,

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada kantor Camat Tarub diselaraskan dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019 – 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Kantor Camat Tarub Tahun 2022 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022.
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Tarub.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.



3.3. Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

- a. Pengarusutamaan Gender ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathaway, gender budget statemen sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

3.4. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Perbup Nomor 75 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tegal;

Program kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan tahun 2022 adalah:

Tabel 3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarub Tahun 2023, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Tarun Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan rencana strategis Kecamatan Tarub tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana kerja juga merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, pertama, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Kedua, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Ketiga, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur output dan outcome-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. Keempat, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Rencana kerja Kecamatan Tarub tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang akan dituju dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :



TABEL 4.1 (T-C.33)
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023				Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu				
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub					1.920.840.000			
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			Kantor Kecamatan Tarub	38.500.000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, jumlah dok renja RB, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	1 Tahun	6.000.000	Kec Tarub	DAU	1 Tahun	6.600.000	Kec Tarub
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok Laporan kinerja LKjIP, Lap Keu, LAKIP	1 Tahun	29.000.000	Kec Tarub	DAU	1 Tahun	31.900.000	Kec Tarub
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.367.671.000		Kantor Kecamatan Tarub		1.370.171.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.342.671.000	Kec Tarub	DAU	1 Tahun	1.342.671.000	Kec Tarub



7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan	1 Tahun	25.000.000	Kec Tarub	DAU		1 Tahun	27.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan		15.000.000			Kantor Kecamatan Tarub		16.500.000	
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan		15.000.000	Kec Tarub				16.500.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.000.000			Kantor Kecamatan Tarub		75.900.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kebutuhan alat listrik dan elektronik	6 Jenis	5.000.000	Kec Tarub	DAU		6 Jenis	5.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpebuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	15.000.000	Kec Tarub	DAU		20 Jenis	16.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpebuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga	16 Jenis	5.000.000	Kec Tarub	DAU		16 Jenis	5.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	13.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	14.300.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah amplop dinas, stopmap dinas banner tercetak dan dokumen yang tergandakan	12 Bulan	8.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	8.800.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan	3.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	3.300.000	Kec Tarub
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya perjalanan dalam rangka kedinasan	12 Bulan	20.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	22.000.000	Kec Tarub



7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan		371.430.100			Kantor Kecamatan Tarub		90.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Meja/Kursi Pegawai dan Mebeulair Ruang Pelayanan Kecamatan Tarub		169.059.000	Kec Tarub	DAU		0		Kec Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia			Kec Tarub	DAU		-		Kec Tarub
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		152.371.100	Kec Tarub	DAU		0	35.000.000	Kec Tarub
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya tercukupi		50.000.000	Kec Tarub	DAU		0	55.000.000	Kec Tarub
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan		118.790.000			Kantor Kecamatan Tarub		130.669.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	12 Bulan	2.500.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	2.750.000	Kec Tarub
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya layanan listrik, telepon dan Internet	12 Bulan	65.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	71.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	51.290.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	56.419.000	Kec Tarub
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD		181.000.000			Kantor Kecamatan Tarub		199.100.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif surat pajak kendaraan; jumlah liter BBM	12 Bulan	75.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	82.500.000	Kec Tarub
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan memsin yang terpelihara	12 Bulan	6.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	6.600.000	Kec Tarub



7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya bangunan kerja gedung kantor	1 Gedung		Kec Tarub	DAU		1 Gedung	-	Kec Tarub
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara	1 Gedung	100.000.000	Kec Tarub	DAU		1 Gedung	110.000.000	Kec Tarub
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	83,05%	52.600.000					57.860.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan		33.100.000			Masyarakat Kecamatan Tarub		36.410.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Tilik Desa)	12 Bulan	3.100.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	36.410.000	Kec Tarub
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan		19.500.000			Masyarakat Kecamatan Tarub		21.450.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rakor PBB (penderasan) paten, IMB	12 Bulan	19.500.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	21.450.000	Kec Tarub
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	20% 0%	135.000.000					148.500.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa		135.000.000			Masyarakat Kecamatan Tarub		148.500.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000	Kec Tarub	DAU		1 Kegiatan	27.500.000	Kec Tarub



7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor, jumlah pelatihan (rakor pasar, pelatihan manajemen BUMDes)		10.000.000	Kec Tarub	DAU		11.000.000	Kec Tarub
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasi, Festival Budaya, Karang Taruna, MTQ, Rakor Kemiskinan	4 Kegiatan	100.000.000	Kec Tarub	DAU	4 Kegiatan	110.000.000	Kec Tarub
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		21.236.500				23.360.150	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum		11.236.500			Masyarakat Kecamatan Tarub	12.360.150	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	3 Kegiatan	11.236.500	Kec Tarub	DAU	3 Kegiatan	12.360.150	Kec Tarub
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan		10.000.000			Masyarakat Kecamatan Tarub	11.000.000	
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda	3 Kegiatan	10.000.000	Kec Tarub	DAU	3 Kegiatan	11.000.000	Kec Tarub
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan		115.000.000				126.500.000	



7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				115.000.000			Masyarakat Kecamatan Tarub		126.500.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	hari jadi Kab tegal dan HUT RI	2 Kegiatan	65.000.000	Kec Tarub	DAU		2 Kegiatan	71.500.000	Kec Tarub	
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	FKDM		25.000.000					27.500.000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Kominikasi Pimpinan Kecamatan	12 Bulan	25.000.000	Kec Tarub	DAU		12 Bulan	27.500.000	Kec Tarub	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi		59.050.000					64.955.000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan		59.050.000			Pemerintah Desa Kecamatan Tarub		64.955.000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Desa	16.200.000	Kec Tarub	DAU		20 Desa	17.820.000	Kec Tarub	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	20 Desa	12.500.000	Kec Tarub	DAU			13.750.000	Kec Tarub	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	20 Desa	21.350.000	Kec Tarub	DAU			23.485.000	Kec Tarub	
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	20 Desa		Kec Tarub	DAU			-	Kec Tarub	



7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	20 Desa		Kec Tarub	DAU		20 Desa	-	Kec Tarub
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa	9.000.000	Kec Tarub	DAU		20 Desa	9.900.000	Kec Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa		Kec Tarub	DAU		20 Desa	-	Kec Tarub
								2.540.777.600					2.342.015.150	



Tabel 4.2
Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Tarub Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Laju Peningkatan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tarub	83,05	Persen	Camat Tarub
2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0	Persen	Camat Tarub
		Peningkatan Persentase desa maju	15	Persen	Camat Tarub
No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	IKM Kecamatan Tarub	83,05	Persen	Kasi Pelayanan Publik
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100	Persen	Kasi Pemerintahan dan Trantibum
No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Satuan	Penanggungjawab
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	68	Persen	Kasi PMD
4	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0	Persen	Kasi Pemdes
		Persentase desa maju Kecamatan Tarub	15	Persen	Kasi Pemdes
5	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	100	Persen	Kasi Pemerintahan dan Trantibum
6	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	100	Persen	Sekretaris Kecamatan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	12	Bulan	Kasi Pelayanan Publik
2	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksanakan	12	Bulan	Kasi Pelayanan Publik
3	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	20	Desa	Kasi Pemerintahan dan Trantibum
4	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	100	Persen	Kasi Pemerintahan dan Trantibum
5	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	20	Desa	Kasi Pemerintahan Desa
6	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	20	Desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	3	Kegiatan	Kasi Pemerintahan dan Trantibum
8	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	14	Dokumen	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
9	Terbayarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	12	Bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	5	Jenis	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	100	Persen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian



13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik	100	Persen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja Sub Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	survey IKM terlaksanakan			Kasi Pelayanan Publik
		jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Kasi Pelayanan Publik
2	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB	18	Desa	Kasi Pelayanan Publik
		Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur			Kasi Pelayanan Publik
3	Terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kecamatan mengikuti Musrenbang Kecamatan			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	Terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasi			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Jenis Kegiatan MTQ			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Rakor Pemuda (Karang Taruna/wirausaha muda)			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Rakor PKK			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Rakor Kemiskinan			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		jumlah jenis Kegiatan Festifal Budaya			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Jenis Kegiatan HUT Hari jadi Kabupaten Tegal	1	Kegiatan	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Jumlah Jenis Kegiatan HUT R,I	1	Kegiatan	
		Jumlah Jenis Kegiatan Pameran Investasi	1	Kegiatan	



	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
11	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sosialisai Pengakan Perda	1	Kegiatan	
12	Terlaksananya Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rakor Sinergitas Trantibum bersama TNI/Polri dan instansi vertical lainnya (Mitigasi Bencana/Siskamling/Satgas Covid-19)	1	Kegiatan	
6	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Desa	Kasi Pemerintahan Desa
		Jumlah Koordinasi Verifikasi IDM/SDG,S	1	Kegiatan	
7	Terlaksananya Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa	20	Desa	Kasi Pemerintahan Desa
8	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	40	Orang	
9	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20	Dokumen	
10	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	1	Kegiatan	
13	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen renja	3	Dokumen	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah jenis dokumen RKA/DPA	6	Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	1	Dokumen	
		Jumlah dokumen renstra/reviu	1	Dokumen	
14	Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen LKJIP	1	Dokumen	



	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	
		Jumlah Dokumen SPIP	1	Dokumen	
15	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarkannya gaji asn/Jumlah bulan gaji ASN yang dibayarkan	1	Tahun	
16	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pelaporan keuangan yang dibuat	5	Dokumen	
		jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12	Bulan	
17	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	12	Bulan	
18	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor/jumlah Jenis ATK yang dibeli	12	Bulan	
19	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia /jumlah jenis bahan pembersih	12	Bulan	
20	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Jenis barang cetakan	12	Bulan	
21	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12	Bulan	
22	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi	12	Bulan	
23	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12	Bulan	
24	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia/ jumlah kendaraan dinas baru	0	Unit	
25	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainya tercukupi/ Jumlah mebelleir baru	40	Unit	
26		jumlah AC	0	Unit	



	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Video Conference	0	Unit
		Jumlah Printer	0	Unit
		Jumlah Laptop	0	Unit
		jumlah perangkat komputer PC	2	Unit
27	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	Bulan
28	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat /Jumlah Materai Surat Menyurat	214	Lembar
29	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor/Jumlah hari jasa pengamanan dan kebersihan	12	Bulan
30	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	0	Gedung
31	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	9	Unit
32	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya terpelihara	4	Unit
33	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya terpelihara (meubelair dsb)	0	Unit



BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarub Tahun 2023 merupakan Renja yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Tarub.

Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal.

Akhirnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi dana yang memadai akan membawa keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tarub, Desember 2021
CAMAT TARUB

Drs. Agung Budi Waluyo, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710205 199201 1 001